

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP) TERHADAP PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN NELAYAN DI DESA SUKA MAJU  
KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMMAD NAZRI MANDAY**

**NPM : 1403090014**

**Ilmu Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NAZRI MANDAY**  
N P M : 1403090014  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA**

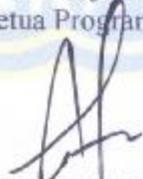
Medan, 2 juli 2018

Pembimbing



**Dr. MOHD. YUSRI, M.Si**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**Dr. ARIFIN SALEH, M.SP**

Dekan,



**Dr. RUDIANTO, M.Si**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NAZRI MANDAY**

N P M : 1403090014

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

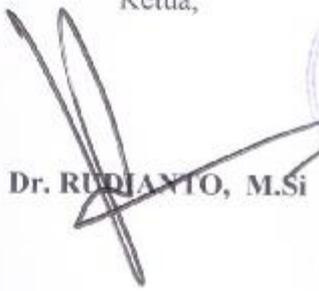
PENGUJI I : **MUJAHIDDIN, S. Sos, M.SP**

PENGUJI II : **Dr. AZAMRIS CHANRA**

PENGUJI III : **Dr. MOHD. YUSRI, M.Si**

### PANITIA UJIAN

Ketua,

  
Dr. RUDJANTO, M.Si



Sekretaris,

  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya ini saya Muhammad Nazri Manday, NPM 1403090014, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

Saya menyadari bahwa memalsukan karya tulis dalam segala bentuk yang dilararang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.

Skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.

Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarsajanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jikalau kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan alasan untuk menerima sanksi :

Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan.

Pencabutan kembali gelar kesarsarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan,



*Muhammad Nazri Manday*  
Muhammad Nazri Manday



Unggul Citas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diuliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MUHAMMAD NAZKI MANDAY  
N P M : 1403092014  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Suca Maju Kecamatan Tanjung Giran Kabupaten Batu Bara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	13/12/2017	Bimbingan dan Revisi proposal Skripsi	↓ ↓
2	27/12/2017	Bimbingan dan Revisi proposal Skripsi	↓ ↓
3	28/12/2017	Bimbingan dan Acc proposal (Sempro)	↓ ↓
4	22/1/2018	Bimbingan Daftar Uraian	↓ ↓
5	20/2/2018	Bimbingan dan Revisi Skripsi (Bab 4 dan 5)	↓ ↓
6	26/2/2018	Bimbingan dan Revisi Skripsi (Pembahasan)	↓ ↓
7	1/3/2018	Bimbingan dan Revisi skripsi (Bab 5)	↓ ↓
8	5/3/2018	Bimbingan dan Revisi Abstrak	↓ ↓
9	6/3/2018	Bimbingan dan Acc skripsi (sidang Meja Hijau)	↓ ↓

Medan, 12 Maret 2018

Dekan,  
  
Dr. Rudianto, M.Si

Ketua Program Studi,  
  
Dr. Anifin Saleh, S.Sos, M.SP

Pembimbing ke : 2...  
  
Dr. Nuzul Yusri, M.Si

**Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)  
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Desa Suka Maju Kecamatan  
Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara**

**ABSTRAK**

Oleh :

**Muhammad Nazri Manday  
1403090014**

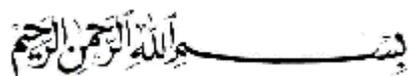
Kabupaten Batu Bara berada di wilayah Pantai Timur Sumatera yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, memiliki sumber potensi laut yang sangat tinggi dan memiliki 20.497 masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan dan 2.121 sebagai perikanan tangkap, yang sebagian besar berada digaris kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kesejahteraan nelayan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara membuat suatu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Paparan di atas meyakinkan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara belum berjalan dengan baik. Penerima program PEMP di desa Suka Maju sangat sedikit dan penerima bantuan tidak mau mengaktualisasikan ilmu yang diberikan.

Kata Kunci : *Program PEMP, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan Nelayan, Desa Suka Maju*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata'ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi peneliti adalah "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara".

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana sosial bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang peneliti hormati dan cintai Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Mohd. Yusri M.Si,

yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada peneliti sejak awal penulisan skripsi sampai selesai. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau.

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta Staffnya.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Zulfahmi M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Abrar Adhani S.Sos, M.Ikom selaku Wkll Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh M.SP selaku Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
6. Bapak Mujahiddin S.Sos, M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu kepada peneliti yang tentunya sangat berguna untuk masa depan peneliti.
8. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kerja samanya dan bantuan kepada peneliti terutama dalam urusan administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teristimewa kepada kedua Orang Tua, Kakak, Abang dan Adik saya yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam pendidikan.
10. Seluruh Staff Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara terutama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir atas kesediaannya memberikan dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Stambuk 2013 Kelas A Pagi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang saling memberikan dukungan Faizul Hamdi Hsb, Asnawi Ahmad, Ahmad Maherdika Hsb, Dede Kumiawan Sufi, Novita Fawali, Taufik Lubis, Irvan Suhandi, Dyah Kirana, Ayuning Tyas, Riswansyah, Wulan Dewi sawitri, Ahmad Maulana, Riswandi, Dedyanto, Fahri Hidayah, Akhyaruddin Purba. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita selama ini.
12. Teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan Alvian Khomeini, Muhammad Yogi.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah Subhana Wata'ala. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini masih

banyak terdapat kekurangan-kekuranga, baikdari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam memperkaya ilmu Pendidikan dibidang Ilmu Kesejahteraan Sosial. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2018  
Penulis,

Muhammad Nazri Manday  
NPM. 1403090014

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	8
A. Implementasi Program.....	8
1. Pengertian Implementasi.....	8
2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	9
3. Analisis Pola Implementasi Kebijakan.....	10
4. Pendekatan Implementasi.....	12
5. Pengertian Program.....	14
6. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program .....	15
B. Pemberdayaan.....	17
1. Pengertian Pemberdayaan.....	17

2. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan.....	20
C. Ekonomi .....	22
1. Pengertian Ekonomi.....	22
2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi.....	24
D. Masyarakat Pesisir.....	25
1. Pengertian Masyarakat Pesisir.....	25
E. Kesejahteraan Nelayan.....	27
1. Pengertian Kesejahteraan.....	27
2. Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial.....	31
3. Pengertian Nelayan.....	33
4. Faktor Penghambat Kesejahteraan Nelayan.....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Kerangka Konsep.....	38
C. Definisi Konsep.....	39
D. Kategorisasi.....	41
E. Informan atau Narasumber.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Lokasi Penelitian.....	43
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
1. Sejarah Singkat Dinas Perikanan Batu Bara.....	43
2. Visi dan Misi Dinas Perikanan Batu Bara.....	46
3. Struktur Organisasi.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Deskripsi Keadaan Narasumber.....	48

2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	50
B. Pembahasan.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR WAWANCARA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	35
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	42

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur.....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu dalam membangun wilayah pesisir dan lautan menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung menuju kearah yang tidak berkelanjutan. Masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir, sering kali tersisih dari pembangunan sebab prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus kepada sektor pertanian atau daratan. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Disamping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, semakin menambah sulit nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Dibandingkan nelayan di negara tetangga seperti Malaysia, Jepang dan lainnya, nelayan Indonesia umumnya memanfaatkan hasil laut untuk bertahan hidup.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan termasuk Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 5,8 kilometer persegi atau sekitar tiga perempat dari luas keseluruhan wilayah Indonesia, yang didalam lautnya berisi berbagai sumber daya yang dianugerahi Tuhan untuk dikelola. Sayangnya, dengan potensi kelautan yang sebesar itu tidak ada sistem pengelolaan yang terpadu berkenaan dengan sumber daya

laut dan sumber daya masyarakat pesisir di Indonesia. Sistem yang ada hanya sistem pengelolaan sentralistik yang memungkinkan penguasaan sumber daya laut di Indonesia oleh nelayan maupun masyarakat pesisir dengan kekuatan modal yang besar. Pada awalnya, pengelolaan semacam ini dimulai sejak masa kolonial Belanda, setelah itu diikuti oleh rezim Orde Baru dan Orde Lama (Satria, 2002:3).

Itu terlihat dari hasil ekspor Indonesia yang lebih rendah dari negara-negara yang memiliki luas laut lebih kecil seperti Thailand yang hanya dengan garis pantai sepanjang 2.400 km tetapi mampu meraup devisa lebih tinggi dari hasil ekspor perikanannya sebesar US\$ 4,11 milyar sedangkan Indonesia hanya mampu meraup devisa sebesar US\$ 2 milyar pada tahun 1998. Juga pada tahun yang sama nilai ekspor total produk rumput laut Indonesia hanya US\$ 75 juta, sementara Filipina yang hanya memiliki 7.000 pulau mampu mengekspor produk rumput laut sebesar US\$ 700 juta. Cina yang memiliki wilayah laut lebih kecil dari pada Indonesia telah menyumbangkan nilai ekonomi sekitar 48% dari PDB Nasionalnya dari sektor kelutan, sedangkan Indonesia baru mencapai 22%. Dari kenyataan itu nampak bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan ini masih rendah (FAO,1998, dalam Nugroho, 2015:2).

Ironi muncul ketika melihat realita yang terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan Kabupaten Batu Bara, dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah tetapi hidup dalam keadaan miskin. Pada saat ini masyarakat nelayan Kabupaten Batu Bara masih jauh dari kata sejahtera. Pada tahun 2016 data Dinas Perikanan

Kabupaten Batu Bara ada sekitar 20.497 masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan dan 2.121 sebagai perikanan tangkap, yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin. Ini tersebar di tujuh kecamatan dan sebagian besar tersebar di kecamatan Tanjung Tiram yang merupakan daerah pesisir.

Kemiskinan nelayan Kabupaten Batu Bara khususnya Kecamatan Tanjung Tiram disebabkan karena pendidikan yang rendah dan ketiadaan modal sehingga tingkat teknologi, inovasi dan penyerapan informasi menjadi rendah yang menyebabkan produktivitasnya menjadi rendah. Ditambah lagi oleh perubahan cuaca dan musim ikan membuat nelayan tidak bisa berbuat apa-apa.

Pada saat ini pembangunan daerah pesisir menjadi fokus utama pemerintah yang diakibatkan karena keterbatasan akses permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir ditingkat desa. Hal ini tertuang dalam arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2014 (dalam, Hartono, 2016) yang menyebutkan bahwa salah satu arah pembangunan harus memerhatikan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan. Tetapi pada saat ini belum ada program yang benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjawab masalah-masalah masyarakat pesisir.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan telah dilakukan, namun pada umumnya usaha tersebut masih bersifat partial dan tidak menyeluruh. Akibatnya kadar kemiskinan nelayan belum dapat dikurangkan secara signifikan (DKP, 2005). Contoh program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan

masyarakat yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil ( P4K ) yang dilaksanakan Departemen pertanian, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan Departemen Sosial. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Kabupaten Batu Bara. Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku penanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pesisir membuat suatu program untuk mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pesisir terutama nelayan yaitu dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau potensi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat pesisir dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan atau ibu-ibu nelayan. Dengan adanya program ini Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara berharap masyarakat pesisir khususnya nelayan bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Batu Bara, tetapi kenyataannya masyarakat pesisir khususnya Nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara masih berada dalam kemiskinan.

Berdasarkan hal yang diatas, maka peneliti menganggap perlu melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”**.

### **B. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini membatasi hanya pada seperti apa **“Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ( PEMP ) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”**.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **“Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”**.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : **“Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”**.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menguji program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
- b. Secara praktis memberikan masukan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, serta menambah pengetahuan masyarakat terhadap program tersebut.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini berisikan uraian teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian yakni, pengertian implementasi, pengertian program, pengertian pemberdayaan, pengertian ekonomi, pengertian masyarakat pesisir, pengertian kesejahteraan dan pengertian nelayan.

**BAB III :METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasannya.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Implementasi Program

##### 1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Anggara, 2004:232), *to implement* (mengimplentasikan) berarti *to providethe means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara:2014:232), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat Cheaves yang dikutip (dalam Wahab 2008 :187), yang secara tegas menyebutkan bahwa : Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan yang terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivet atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158, dalam Noer, 2012).

Pengertian lain dari implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijaksanaan ditetapkan) yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, untuk mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan sejak semula (syukur, 1988:11, dalam Noer, 2012).

Dari defenisi diatas, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (Agustino, 2006:136, dalam Noer, 2012):

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

- b. Adanya aktivitas pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan.

Selain itu terdapat hal pokok dalam implementasi, yaitu (Agustino, 2006:136, dalam Noer, 2012):

- a. Adanya kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Adanya *target group*/ kelompok sasaran yang merupakan kelompok masyarakat yang diharapkan menerima manfaat dari kebijakan.
- c. Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebagai tindakan nyata atau pelaksanaan dari program pemerintah yang dilakukan oleh pihak-pihak atau badan-badan yang berwenang dari pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

### **3. Analisis Pola Implementasi Kebijakan.**

Ada dua konsep dasar berkenaan dengan implementasi kebijakan. Pertama, konsep tentang peralatan kebijakan (policy instrument). Peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang ingin dicapai. Kedua, konsep tentang kewenangan yang tersedia

untuk melaksanakan implementasi. Kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan. Kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Disamping kedua konsep tersebut, dilapangan kita menjumpai beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai faktor teknis, faktor administratif, dan hubungan kerja antar organisasi atau antar instansi. Levitt dalam (Abidin, 2012 : 154). Faktor teknis itu antara lain berkenaan dengan :

- a. Kondisi teknis dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kimia pabrik.
- b. Intensitas tingkat keparahan permasalahan, yang menunjukkan tingkat bahaya atau risiko yang ditimbulkan oleh suatu masalah, apakah suatu masalah masih berada dibawah ambang batas atau sudah melampauinya.
- c. Tingkat penguasaan teknologi yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Faktor administratif meliputi aspek-aspek administratif dari hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut, antara lain :

- a. Status kebijakan.

- b. Peralatan kebijakan.
- c. Sistem administrasi dan lingkungan kerja yang ada.
- d. Jangka waktu yang ditentukan dan yang diperlukan.

Sementara itu, hubungan kerja antar instansi yang terkait, antara lain mencakup :

- a. Kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.
- b. Peran dan kekuasaan yang ada pada masing-masing instansi.
- c. Teknik komunikasi yang dipakai.

#### **4. Pendekatan Implementasi**

Menurut Abidin (2012 : 155) proses implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas kebawah. Apa yang di implementasikan adalah apa yang telah diputuskan. Namun dalam masyarakat yang demokratis, seperti yang telah diungkapkan peranan rakyat sebagai pemiliki Negara selalu harus diindahkan. Sehubungan dengan kecenderungan dari implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip demokrasi, implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan struktural.

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama dengan proses penataan institusi.

b. Pendekatan prosedural dan manajerial.

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis. Implementasi tidak lain daripada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep planning, evaluation, dan review technique (PERT). Sesuai dengan pengertian prosedural, yang penting dalam proses implementasi adalah tata urutan, baik dalam pengertian prioritas berdasarkan signifikansi maupun prioritas menurut waktu.

c. Pendekatan Kejiwaan.

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sering kali sangat penting, bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam kebijakan.

d. Pendekatan politik.

Dilihat dari pandangan ini, implementasi kebijakan tidak dilepaskan dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi, yang dapat disebut sebagai politik dalam birokrasi. Persoalannya disini menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi. Menurut Hogwood and Gunn, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan

dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Hogwood and Gunn dalam (Abidin, 2012 : 157).

## **5. Pengertian Program**

Program akan menunjang implementasi, karena dalam program memuat berbagai aspek yaitu:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijakan yang harus diambil dalam mencapai suatu tujuan.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

(Chema dan Rondinelli, dalam Tangkilisan, 2005:219)

Program menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah suatu aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu yang spesifik dalam ruang dan waktu yang terbatas yang terdiri dari berbagai proyek yang saling berhubungan dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas (Noer, 2012).

Sedangkan menurut Jones, program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu, adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat

tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberi manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan (Waluyo, 2007:44).

Dari penjelasan diatas program dapat diartikan sebagai bentuk operasional dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tersusun secara jelas guna melaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan agar dapat tercapai secara nyata.

## **6. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program**

Menurut Donald P. Warwick dalam tahap implementasi program terdapat dua kategori faktor yang bekerja mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek, yaitu: faktor pendorong (*facilitating condition*) dan faktor penghambat (*impeding condition*) (dalam, Noer, 2012).

Warwick (dalam Noer, 2012) menjelaskan faktor pendorong dalam implementasi program (*facilitating condition*) tersebut terdiri dari:

- a. Komitmen pimpinan politik (*commitment of political leaders*), yakni adanya komitmen dari pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan suatu proyek menjadi hal yang utama, karena pimpinan politik adalah yang memiliki kekuasaan di daerah.
- b. Kemampuan organisasi (*organizational capacity*).

- c. Komitmen para pelaksana (the commitment of implementors): if the generals are ready to move to captain and toops will follow.
- d. Dukungan kelompok kepentingan (interest group support): pelaksanaan kebijakan lebih sering mendapat dukungan dari kelompok kepentingan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan.

Sedangkan beberapa faktor yang secara teoritik dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program (impeding condition) menurut Warwick (dalam Noer, 2012) ialah:

- a. Banyaknya aktor yang terlibat: semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan dan semakin besar kemungkinan terjadi hambatan dalam implementasi proyek tersebut.
- b. Terdapat komitmen atau loyalitas ganda: hal ini disebabkan adanya tugas ganda yang dirangkai dan dijabat oleh suatu organisasi sehingga perhatian pelaksana menjadi terpecah.
- c. Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri (intrinsic complexity): hambatan yang biasanya melekat adalah disebabkan oleh faktor-faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan pangan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.

- d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak: semakin banyak jenjang pengambilan keputusan atau memiliki prosedur yang harus disetujui oleh pihak yang berwenang, maka akan memerlukan waktu lama dalam pelaksanaannya.
- e. Faktor lain, yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan: perubahan kepemimpinan baik pada tingkat pimpinan pelaksana maupun dalam organisasi di daerah sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap proyek atau program.

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005:57). Pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya (Soetomo, 2011:69). Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat hasil pembangunan. Pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan kreativitas. Hal itu disebabkan

karena melalui mekanisme swakelola pembangunan, disadari atau tidak terjadi proses bekerja sambil belajar oleh masyarakat.

Menurut Mardikanto dkk (2013) pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lainnya.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi, internal seperti persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal seperti ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil (Suharto, 2005:58).

Proses pemberdayaan mengutamakan desentralisasi. Desentralisasi tersebut terutama dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan sumberdaya. Dengan demikian pemberdayaan memberikan kewenangan kepada masyarakat sampai tingkat komunitas local dalam pengambilan keputusan serta dalam pengelolaan pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, juga pelaksanaan (Soetomo, 2011:72). Hal itu dimaksudkan agar kepentingan lapisan-lapisan bawah termasuk lapisan miskin tetap dapat terakomodasi.

Suharto (2005:58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

## 2. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer dalam Soeharto (2005:63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parson *et.al.* dalam Soeharto (2005:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus pemberdayaan secara operasional perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan orang itu berdayan atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberika, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan. Misalnya dalam hal ini ekonomi masyarakat pesisir.

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2005:64).

- a. Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika ia mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil, merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, kebutuhan dirinya sendiri seperti rokok, minyak rambut dan lain-lain. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih lagi jika ia menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti televisi, lemari, baju dan lain-lain. Seperti hal indikator diatas, poin tinggi kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin kepada pasangannya, terlebih jika ia menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, seperti mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama anggota keluarga mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relative dari dominasi keluarga

- f. Kesadaran hukum dan politik
- g. Keterlibatan dalam kampanye ataupun prote-protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; memiliki rumah, tanah, asset produktif maupun tabungan.

## **C. Ekonomi**

### **1. Pengertian ekonomi**

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Oikus atau Oiku” dan “Nomos” yang berarti peraturan rumah tangga (Putong, 2008:1). Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga, tentu saja yang dimaksud dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia (Putong, 2008:1).

Menurut George Soul, ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Richard dan Steiner, 1991:9). Seorang ahli ekonomi bangsa Jerman yaitu Georg Friedrich List membagi tahap-tahap kehidupan ekonomi manusia (Rosyidi, 2009) diantaranya:

- a. Perburuan dan perikanan.
- b. Peternakan.
- c. Pertanian.
- d. Pertanian dan kerajinan setempat;
- e. Pertanian, industry, perniagaan internasional

Dalam perkembangan selanjutnya kata ekonomi selalu diidentikan dengan “dapat terjangkau, hemat dan sederhana”, misalnya kita mendengar kata “kemasan ekonomi”, “kelas ekonomi” dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi pemikiran, maka ekonomi dijadikan suatu kata dari suatu ilmu, yaitu ilmu ekonomi yaitu ilmu mengatur “rumah tangga”(Putong, 2008:1).

Menurut Prof.P.A.Samuelson (dalam Putong,2008:2) ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan dimasa datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Sedangkan Mankiw (dalam Putong, 2008:3) mendefenisikan ilmu ekonomi sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka.

## 2. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi

Prinsip dasar ekonomi adalah Patokan perilaku pelaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan (Putong, 2009:12). Selama ini prinsip ekonomi yang banyak diajarkan dan dikenal adalah berusaha dengan usaha sekecil mungkin (tertentu) untuk mendapatkan hasil maksimal. Prinsip ini jelas akan mengarahkan pada tindakan para pelaku ekonomi yang membolehkan semua cara untuk memenuhi kebutuhannya, padahal dalam memenuhi kebutuhan ekonominya pelaku ekonomi harus tunduk pada etika dalam perekonomian (hanya menerima bila telah sepakat membayar). Gregory Mankiw mengidentifikasi 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian (dalam Putong, 2009:12) yaitu:

- a. Empat Prinsip yang melandasi Keputusan Tingkat Individu yaitu:
  - 1) Setiap individu (harus) selalu melakukan trade off
  - 2) Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu
  - 3) Orang rasional berpikir secara bertahap
  - 4) Kita (pelaku ekonomi) bereaksi terhadap insentif
- b. Tiga Prinsip Untuk Interaksi
  - 1) Perdagangan dapat (harus) menguntungkan semua pihak
  - 2) Pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi

- 3) Pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar
- c. Tiga Prinsip Cara Bekerja Perekonomian Makro ( Agregatif)
- 1) Standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya memproduksi barang dan jasa
  - 2) Harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak
  - 3) Masyarakat menghadapi *Trade Off* jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.

## **D. Masyarakat Pesisir**

### **1. Pengertian Masyarakat Pesisir**

Masyarakat dapat diartikan dalam 2 konsep, yaitu (Suharto, 2005:39):

- a. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama.
- b. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Menurut Satria (dalam Ikhsani, 2011) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan

memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengelola dan pedagang hasil perikanan, industry dan jasa maritim.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dalam sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya dan sangat beragam identitas, spesialisasi pekerjaan, derajat sosial, pendidikan serta latar belakang budayanya. Adapun berbagai tipe pekerjaan dari masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

- a. Nelayan penangkap ikan dan hewan-hewan laut lainnya.

- b. Petani ikan (budidaya air payau atau tambak dan budidaya laut)
- c. Pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut.
- d. Pemilik atau pekerja industry pariwisata.
- e. Pemilik atau pekerja pertambangan dan energy.
- f. Pemilik atau pekerja industry mritim (galangan kapal).

## **E. Kesejahteraan Nelayan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut Fahrudin (dalam Rosni, 2017) kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Menurut Prabawa (dalam Rosni, 2017) kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang

maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan menurut Rambe (dalam Rosni, 2017) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (dalam Rosni, 2017) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (security),
- b. Kesejahteraan (welfare),
- c. Kebebasan (freedom), dan
- d. Jati diri (identity).

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kalle (dalam Rosni, 2017) kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.

- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebituhan yang lain.

Didalam UU No. 11 tahun 2009 dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Midgley (1997, dalam Rukminto, 2013:23) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya segala kebutuhan manusia atau seseorang sehingga manusia itu mampu melaksanakan

fungsi sosialnya dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang ada. Dalam meningkatkan kesejahteraan Midgley (dalam Rukminto,2013:25-26) melihat ada tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial secara konvensional yaitu:

- a. Pendekatan Filantropi Sosial (Social Philanthropy) yang mengandalkan pada donator personal, upaya-upaya sukarela, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta menciptakan kesempatan setiap warga masyarakat agar dapat lebih mengembangkan diri mereka.
- b. Pendekatan pekerjaan sosial (Social Work) yang mengandalkan pada tenaga profesional untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dengan melakukan intervensi pada individu, kelompok maupun komunitas.
- c. Pendekatan Administratif Sosial (Social Administration) yang mengandalkan pada intervensi pemerintah melalui berbagai macam usaha kesejahteraan sosial yang menjadi kewajiban pemerintah (statutory social services). Pendekatan ini juga dikenal dengan nama Pendekatan Kebijakan Sosial ataupun Pelayanan Sosial (Social Services or Social Policy Approach).

## 2. Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam melihat berbagai bidang Kesejahteraan Sosial, beberapa pakar dalam bidang Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial tidak jarang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada 2 pandangan kesejahteraan sosial yaitu Kesejahteraan Sosial dalam arti luas dan Kesejahteraan dalam arti sempit. Di Indonesia, bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit sering diidentifikasi dengan bidang-bidang yang ditangani oleh Kementerian sosial atau diberbagai negara berkembang dikaitkan dengan *Ministry of Health and Welfare* (Kementerian Kesejahteraan dan Kesehatan), sedangkan untuk bidang Kesejahteraan Sosial dalam arti luas sering kali diidentifikasi dengan bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi berbagai Kementerian seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan lain-lain (Rukminto, 2013:90).

Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, digambarkan oleh Fink, Friedlander, Mendoza, Zastrow dan Kirst-Ashman (dalam Rukminto, 2013:91-101) antara lain meliputi:

- a. Bidang yang Terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan (*Service Delivery System*).
- b. Bidang yang Terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga

- c. Bidang yang Terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-anak dan Generasi Muda.
- d. Bidang yang Terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia).
- e. Bidang yang Terkait dengan Kelompok Khusus.
- f. Bidang yang Terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial).
- g. Bidang yang Terkait dengan Pengentasan Kemiskinan.
- h. Bidang yang Terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat.
- i. Bidang yang Terkait dengan Perawatan Medik.
- j. Bidang yang Terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa.
- k. Bidang yang Terkait dengan Lembaga Koreksional.
- l. Bidang yang Terkait dengan Lembaga Pendidikan.
- m. Bidang yang Terkait dengan Area Lain.

Sedangkan bidang Kesejahteraan Sosial dalam arti luas (Rukminto, 2013:101-103) meliputi:

- a. Bidang Kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Besaran (*size*) Kelompok Sasaran.
- b. Bidang Kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Tingkat Usia Kelompok Sasaran.

- c. Bidang Kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Kekhususan Masalah yang Ditangani.
- d. Bidang Kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Sektor-sektor Pembangunan

### **3. Pengertian Nelayan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nelayan adalah orang atau masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan di dalam UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron dalam Subri, 2005:7).

Nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya (Kusnadi, 20017). Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang

membedakan mereka dari masyarakat lain dan nelayan identik dengan kemiskinan, banyaknya jumlah anak dalam keluarga dan pendidikan yang rendah (Kusnadi, 2009).

Ada beberapa jenis nelayan yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, yaitu:

- a. Nelayan Kecil yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
- b. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- c. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- d. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

#### 4. Faktor Penghambat Kesejahteraan Nelayan

Menurut Hilakore *et al* (dalam Nugroho, 2015:2) ketidakberdayaan nelayan-nelayan kita untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang kurang.
- b. Ketiadaan modal untuk membeli alat tangkap ikan yang jauh modern.
- c. Sistem penangkapan ikan tradisional yang hanya mengandalkan perahu-perahu kecil atau sampan. Keterbatasan alat tangkap ini menyebabkan mereka tidak mampu masuk wilayah laut yang lebih jauh dan dalam.
- d. Mereka tidak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan yang memiliki modal besar dan mengoperasikan alat tangkap ikan modern dengan sistem kerja yang modern pula.
- e. Belum maksimalnya intervensi pemberdayaan dari luar (dalam hal ini pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan kaum nelayan).

Sedangkan menurut Kusnadi (dalam Rosni, 2017) kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

- a. Faktor internal, yakni:
  - 1) Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia;
  - 2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan;
  - 3) Hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh;
  - 4) Kesulitan melakukan deversifikasi usaha penangkapan;
  - 5) Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap okupasi melaut;
  - 6) Gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.
- b. Faktor eksternal yakni:
  - 1) Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi kepada produktifitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial;
  - 2) Sistem hasil pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara;
  - 3) Kerusakan akan ekosistem.

Kemiskinan pada nelayan terjadi akibat rendahnya pendidikan yang di tempuh oleh para nelayan. Menurut Friawan (dalam Rosni, 2017) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas.

Maka dari itu semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan meningkatkan sumber daya manusia dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan suatu penduduk dimana tingkat pendidikan yang tinggi dapat membentuk manusia terampil dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk (BPS Sumut, 2013 dalam Rosni, 2017). Dengan demikian pendidikan sangat menentukan sejahtera atau tidaknya seseorang yang mana jika pendidikan tinggi maka orang tersebut memiliki keterampilan dan produktif guna menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahtraannya.

## **BAB III**

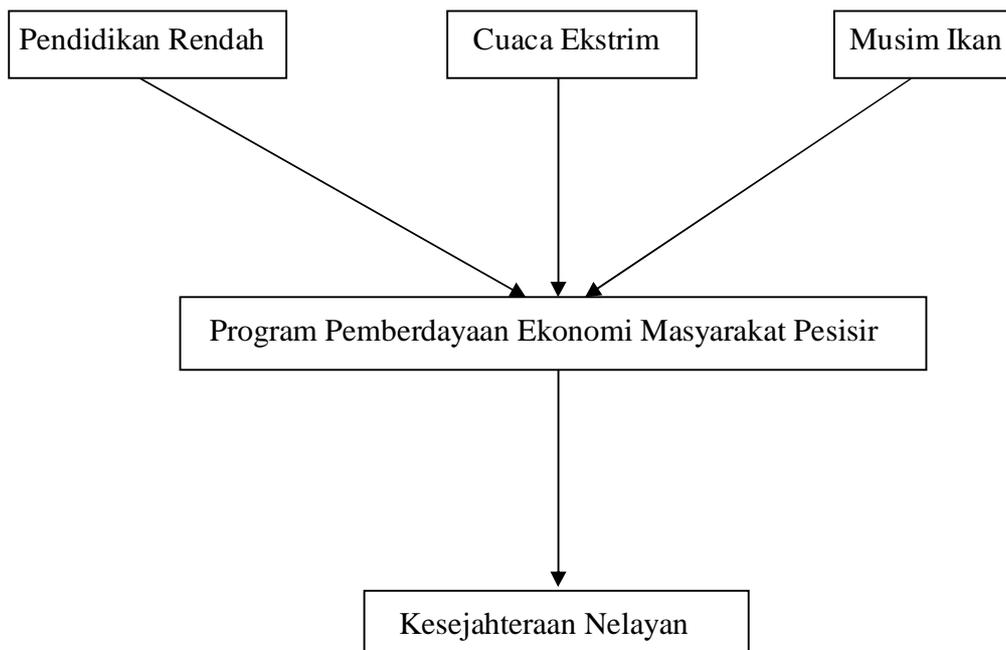
### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain (Sugiyono, 2006:11). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai fakta dari bagaimana sebenarnya Implementasi Program Pemnerdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

#### **B. Kerangka Konsep**

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

### **C. Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

Adapun yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau mengoperasikan sebuah program baik itu yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, masyarakat maupun pemerintah sendiri.
2. Program adalah bentuk operasional dari satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tersusun secara jelas guna melaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan agar dapat tercapai secara nyata.
3. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah.
4. Ekonomi adalah segala hal yang menyangkut peri kehidupan dalam rumah tangga.
5. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir dan memanfaatkan sumber daya pesisir.
6. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya segala kebutuhan manusia atau seseorang sehingga manusia itu mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada.
7. Nelayan adalah kelompok masyarakat yang mata pencahariannya menangkap ikan.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi berarti penyusunan kategori, dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kategorisasi sebagai berikut:

1. Adanya tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan kepada nelayan.
2. Adanya mekanisme dalam pelaksanaan Program PEMP.
3. Adanya kemampuan pelaksana Program PEMP.
4. Adanya peningkatan kesejahteraan nelayan.

#### **E. Informan atau Narasumber**

menurut David Williams dalam Moleong (2013:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ketema umum.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Staff Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara
2. Nelayan Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang mengikuti Program PEMP.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer:
  - a. Metode wawancara (Interview), yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan informan.
  - b. Metode observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi kepustakaan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu-satuan. Kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya kedalam analisis dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan

peneliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

#### **H. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara sebagai pembuat dan pelaksana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

#### **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Perikanan Batu Bara**

Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara di tetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara No. 2 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Adapun pejabat yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara pertama adalah OK. Arya Zulkarnain, SH, MH. yang dilantik pada Desember 2007.

Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara pertama kali berlokasi di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh. Selanjutnya sejak mulai tanggal 28 Januari 2008 Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara berpindah ke lokasi yang berada di sebelah bangunan kantor yang lama yaitu di Jalan Lintas Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh yang diresmikan oleh Bupati Batu Bara OK. Arya Zulkarnain, SH. MH dan Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.Si. Dan pada tahun 2017 Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara pindah ke lokasi Jalan Lintas Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh.

Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara telah dipimpin oleh beberapa kepala dinas sebagai berikut yaitu OK.Arya Zulkarnain, SH. MH. , Syaiful Adenan Siregar, Ir. Azwar Hamid, M.Sc, dan yang sekarang Ir. Rinaldi, M.Si.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara sekarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ditetapkan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kantor Dinas Perikanan pertama kali berlokasi di Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus laut Kecamatan Lima Puluh, Lalu pada bulan Oktober 2008 berpindah di lokasi Jl. Perintis Kemerdekaan Kecamatan Lima Puluh dan pada tahun 2017 sampai saat ini kantor Dinas Kelautan dan Perikanan berlokasi di Jl.Lintas Perupuk Kecamatan Lima Puluh.

Pada tahun 2007 sampai 2008 Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Bapak OK Arya Zulkarnain, SH, MM, Lalu Pada tahun 2008 sampai 2011 Dipimpin oleh Bapak Ir. Azwar Hamid, M.Sc, dan pada bulan September 2011 sampai dengan saat ini Dipimpin oleh Bapak Ir. Rinaldi, M.Si.

Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No.3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pada tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara mempunyai 4 (empat) bidang yaitu

- a. Pengembangan SDM Perikanan dan Kelautan
- b. Sarana dan Prasarana Perikanan
- c. Kelautan dan Pesisir
- d. Perikanan Budidaya

Pada tahun 2014 di lakukan perampingan Struktur Organisasi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu,

- a. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- b. Budidaya dan Teknologi
- c. Pengawasan.

## **2. Visi dan Misi Dinas Perikanan Batu Bara**

### **a. Visi**

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang optimal, berwawasan lingkungan dan berkesinambungan untuk masyarakat batubara sejahtera dan berjaya.

### **b. Misi**

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat (partisipasi aktif) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut
- 3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap masyarakat pesisir untuk kesejahteraannya
- 4) Memelihara dan menjaga kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan terkendali.

## **3. Struktur Organisasi**



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Keadaan Narasumber**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan juga dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

## a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

**Table 4.1****Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi (%)</b>
<b>1</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Perempuan</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Wawancara 2018**

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut bahwa seluruh narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 7 orang atau 100%, sedangkan narasumber berjenis kelamin perempuan sebanyak 0 dengan presentasi 0%.

## b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.2****Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi (%)</b>
<b>1</b>	<b>Sarjana 1</b>	<b>3</b>	<b>43%</b>
<b>2</b>	<b>SMP</b>	<b>2</b>	<b>28.5%</b>
<b>3</b>	<b>SD</b>	<b>2</b>	<b>28.5%</b>
<b>4</b>	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Wawancara 2018**

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut bahwa narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yaitu Sarjana 1 dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 43%, SMP dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 28.5% dan SD dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 28.5%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

**Tabel 4.3**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi (%)</b>
<b>1</b>	<b>26-35</b>	<b>2</b>	<b>28.5%</b>
<b>2</b>	<b>46-55</b>	<b>2</b>	<b>28.5%</b>
<b>3</b>	<b>56-65</b>	<b>3</b>	<b>43%</b>
<b>4</b>	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Wawancara 2018**

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat kita lihat bahwa narasumber berumur 56-65 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 43%, narasumber berumur 26-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 28.5%, dan narasumber berumur 46-55 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 28.5%.

## **2. Deskripsi Hasil Wawancara**

Pada hal ini akan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu: Sekretaris Dinas Perikanan Batu Bara, Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir Dinas Perikanan Batu Bara, Staff Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Perikanan Batu Bara, dan Nelayan Desa Suka Maju.

**a. Adanya Tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang Dilaksanakan Kepada Nelayan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Ishak selaku Sekretaris Dinas Perikanan, menyatakan bahwa tujuan dari program PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan cara memberdayakan istri-istri nelayan. Program ini dibuat karena nelayan belum mampu memaksimalkan hasil penangkapan ikannya. Adapaun tujuan dalam program PEMP belum maksimal tercapai karena masyarakat penerima program ini kurang mengaplikasikan ilmu atau pelatihan yang diberikan.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Kristian Ginting S. Kel selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir menuturkan bahwa tujuan dari program PEMP adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan disamping hasil utama dari pendapatan penangkapan ikan. Adapun program ini dibuat karena pendapatan nelayan dalam menangkap ikan masih belum mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk meningkatkan nilai mutudari produk-produk pengolahan ikan. Tujuan dari program ini belum tercapai secara maksimal karena masyarakat penerima program ini kurang mengaplikasikan ilmu dari pelatihan yang diberikan

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Arbiansyah S selaku Staff Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir menyatakan bahwa tujuan dari program PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang dilatarbelakangi karena para nelayan masih jauh dari kata sejahtera dan ketika cuaca sedang tidak baik nelayan tidak memiliki penghasilan. Adapun tujuan dari program ini belum tercapai secara maksimal karena masyarakat penerima program ini kurang mengaplikasikan ilmu dari pelatihan yang diberikan.

**b. Adanya Mekanisme Dalam Pelaksanaan Program PEMP.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ishak menyatakan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan program PEMP ini dilakukan dengan cara menghubungi para kelompok atau keluarga nelayan untuk datang ketempat kegiatan dilaksanakan, dan kegiatan yang dilakukan berbentuk pelatihan dan pembinaan. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2012 dan dilaksanakan 1 sampai 2 kali dalam setahun.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ade Kristian Ginting S. Kel yang menyatakan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan program ini yaitu dengan cara memanggil para kelompok atau keluarga nelayan untuk datang ketempat dilaksanakannya kegiatan. Adapun jenis kegiatan dalam program ini berbentuk pelatihan atau pembinaan dan kegiatan ini dilaksanakan 1 sampai 2 kali setahun dan sudah berjalan sejak 2012.

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Mhd. Arbiansyah S yang menyatakan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan program ini yaitu dengan cara memanggil para kelompok atau keluarga nelayan untuk datang ketempat dilaksanakannya kegiatan. Adapun jenis kegiatan dalam program ini berbentuk pelatihan atau pembinaan dan kegiatan ini dilaksanakan 1 sampai 2 kali setahun dan sudah berjalan sejak 2012.

**c. Adanya Kemampuan Pelaksana Program PEMP.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ishak menyatakan bahwa kemampuan dari pelaksana program ini sudah berkompeten, dimana pelaksana program ini merupakan Dinas Perikanan sendiri dan melibatkan pemateri atau tenaga pelatih yang ahli dibidangnya dan merupakan lulusan sarjana dan ada juga pemateri merupakan orang yang sudah sukses menjalankan usaha dari pelatih yang diberikan. Dalam melaksanakan pelatihan dan pembinaan antusias masyarakat sangat tinggi tetapi setelah selesai kegiatan masyarakat kurang mengaktualisasikan ilmu yang diberi. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu dana yang kurang sehingga program yang diberikan hanya sebatas pelatihan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Kristian Ginting S. Kel menyatakan bahwa kemampuan dari pelaksana program ini sudah berkompeten, dimana pelaksana program ini merupakan Dinas Perikanan sendiri dan melibatkan pemateri atau tenaga pelatih yang ahli dibidangnya dan merupakan lulusan sarjana

dan ada juga pemateri merupakan orang yang sudah sukses menjalankan usaha dari pelatihan yang diberikan. Dalam mencapai tujuan dari program ini terdapat masalah yang dihadapi yaitu kurangnya kemauan masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang diberikan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mhd. Arbiansyah S yang menyatakan bahwa kemampuan dari pelaksana program ini sudah berkompeten, dimana pelaksana program ini merupakan Dinas Perikanan sendiri dan melibatkan pemateri atau tenaga pelatih yang ahli dibidangnya dan merupakan lulusan sarjana dan ada juga pemateri merupakan orang yang sudah sukses menjalankan usaha dari pelatihan yang diberikan. Dalam mencapai tujuan dari program ini terdapat masalah yang dihadapi yaitu kurangnya kemauan masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang diberikan.

#### **d. Adanya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahidin selaku nelayan atau keluarga nelayan menyatakan bahwa program PEMP yang diberikan kepadanya bukan sesuatu yang bisa mengatasi masalahnya sepenuhnya dikarenakan program PEMP bukan hal yang paling dibutuhkannya. Adapun setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari program PEMP tidak terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap dirinya dan keluarganya, itu disebabkan karena keluarganya /kelompoknya tidak menjalankan atau mengaktualisasikan ilmu yang didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri yang merupakan nelayan atau keluarga nelayan menyatakan bahwa program PEMP yang diberikannya kepadanya bukan sesuatu yang bisa mengatasi masalahnya sepenuhnya dikarenakan program PEMP bukan hal yang paling dibutuhkannya. Adapun setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari program PEMP tidak terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap dirinya dan keluarganya, itu disebabkan karena keluarganya /kelompoknya tidak menjalankan atau mengaktualisasikan ilmu yang didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amersyah yang merupakan nelayan atau keluarga nelayan menyatakan bahwa program PEMP yang diberikannya kepadanya bukan sesuatu yang bisa mengatasi masalahnya sepenuhnya dikarenakan program PEMP bukan hal yang paling dibutuhkannya. Adapun setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari program PEMP tidak terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap dirinya dan keluarganya, itu disebabkan karena keluarganya /kelompoknya tidak menjalankan atau mengaktualisasikan ilmu yang didapat.

Begitupun halnya dengan Bapak Hasan Basri yang merupakan nelayan atau keluarga nelayan menyatakan bahwa program PEMP yang diberikannya kepadanya bukan sesuatu yang bisa mengatasi masalahnya sepenuhnya dikarenakan program PEMP bukan hal yang paling dibutuhkannya. Adapun setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari program PEMP tidak terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap dirinya dan keluarganya, itu disebabkan karena keluarganya /kelompoknya tidak menjalankan atau mengaktualisasikan ilmu yang didapat.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data diatas, maka dalam pembahasan ini merupakan kajian atau analisis dari hasil wawancara dari para informan atau narasumber sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

### **1. Adanya Tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang Dilaksanakan Kepada Nelayan.**

Tujuan dari program PEMP adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan disamping hasil utama dari pendapatan penangkapan ikan dengan cara memberdayakan istri-istri nelayan. Tujuan yang dimaksud belum tercapai secara maksimal, itu bisa dilihat dari jumlah penerima program PEMP tahun 2017 di Desa Suka Maju hanya 4 keluarga/kelompok (Dinas Perikanan, 2018), ditambah lagi dari ke 4 keluarga/kelompok nelayan tersebut tidak mengaktualisasikan ilmu yang telah diberikan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari program PEMP belum tercapai di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

### **2. Adanya Mekanisme Dalam Pelaksanaan Program PEMP.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menganggap bahwa mekanisme dalam pelaksanaan program PEMP belum maksimal dilakukan, itu bisa dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 hanya dilakukan 2 kali saja yaitu kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir (pelatihan pengolahan kaki naga) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Pembinaan Dan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir (Pelatihan Pengolahan Stick Jeruju) yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Mei 2017 (Dinas Perikanan, 2018). Seharusnya dalam kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pendampingan kepada masyarakat, agar ilmu yang diberikan benar-benar diaktualisasikan oleh masyarakat sehingga pembinaan atau pelatihan tidak merupakan sesuatu yang sia-sia.

### **3. Adanya Kemampuan Pelaksana Program PEMP.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan pelaksana program PEMP sudah baik, itu bisa dilihat dari instruktur kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (pelatihan pengolahan kaki naga) adalah Ibu Yeni Fatimah yang merupakan pengolah pembuatan kaki naga dari ikan di Kabupaten Batu Bara, dan untuk kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir (Pelatihan Pengolahan Stick Jeruju) adalah Ibu Ika Pratiwi Nasution S.Pi dan Bapak Wan Khairul Fadli Harahap A.Md yang keduanya merupakan pengolah pembuatan olahan dari daun jeruju di Kabupaten Batu Bara.

### **4. Adanya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa tidak terjadinya peningkatan kesejahteraan nelayan setelah mendapatkan program tersebut, itu bisa dilihat dari jawaban narasumber (nelayan)

yang mengatakan bahwa mereka tidak mengaktualisasikan ilmu yang diberikan karena program tersebut bukan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka dan tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan dan dibahas di bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan disamping hasil utama dari pendapatan penangkapan ikan dengan cara memberdayakan istri-istri nelayan, dan hal tersebut belum tercapai secara maksimal terhadap keluarga nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Itu dapat dilihat dari sedikitnya penerima Program PEMP di Desa Suka Maju dan keluarga nelayan yang mendapati program tersebut tidak mengaktualisasikan ilmu yang diberikan.
2. Mekanisme dalam pelaksanaan Program PEMP di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara belum maksimal. Itu bisa dilihat dari kegiatan yang hanya dilakukan 2 kali dalam setahun.
3. kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan Program PEMP di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sudah baik, yang merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya.

4. Tidak terjadinya peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena mereka tidak mengaktualisasikan ilmu yang diberikan karena program tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang sangat mereka butuhkan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara harus lebih bekerja keras dan serius untuk dapat mewujudkan tujuan Program PEMP sehingga seluruh masyarakat atau keluarga nelayan di Desa Suka Maju dapat merasakan Program PEMP dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
2. Dinas Perikanan hendaknya membuat atau memberikan pendampingan terhadap keluarga-keluarga nelayan yang telah menerima Program PEMP sehingga keluarga nelayan benar-benar mengaktualisasikan ilmu yang diberikan.
3. Dinas Perikanan Batu Bara lebih meningkatkan kualitas dari pelaksana-pelaksana Program PEMP sehingga masyarakat nelayan di Desa Suka Maju benar-benar mengerti bahwasanya program yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

4. Dinas Perikanan Batu Bara harus bisa memahami apa-apa saja masalah-masalah dan hal yang dibutuhkan dari nelayan-nelayan di Desa Suka Maju, sehingga program yang diberikan tidak sia-sia.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Anggara, Sahaya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Hartono, Sugeng. 2016. “Gagasan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pendekatan Sistem”. *Mina Indonesia* (April 2014).
- Moleong. J. Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Noer, Isna Fitriana. 2012. “Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Ngrayun”. *Jurnal Kebijakan dan Manajaemen Publik* (2012).
- Nugroho, Matheus. 2015. “Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kabupaten Pasuruan”. *J. Rakepangan*, 9.1(Juni 2015).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, Tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan.
- Putong, Iskandar. 2008. *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Rosni, 2017. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”. 9.1(2017). 27 Desember 2017.  
<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo>
- Rosyidi, Suherman. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi: pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Rukminto, Isbandi Adi. 2015. *Kesejahteraan Sosial(pekerjaan social, pembangunan social, dan kajian pembangunan*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Satria, Arif. Dkk. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta. Cidesindo.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. PT. reflika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Grasindo.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

**Daftar Wawancara**  
**(Staff Dinas Perikanan)**

**Nama** : ADE KRISTIAN GINTING S. Kel  
**Umur** : 33 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Jabatan** : **KABID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR**  
**Alamat** : **Per. Putri Indah Permai Indra Pura**

**A. Adanya tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)**

1. Apa tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)?

Jawab : Membantu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan disamping hasil utama dari pendapatan penangkapan ikan.

2. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya program PEMP?

Jawab : Dikarenakan pendapatan nelayan dalam menangkap ikan masih belum mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan nilai mutu produk pengolahan ikan.

3. Apakah tujuan dari Program PEMP sudah tercapai?

Jawab : Belum sepenuhnya tercapai karena masyarakat penerima program ini kurang mengaplikasikan ilmu dari pelatihan yang diberikan.

4. Siapakah sasaran dari Program PEMP?

Jawab : Kelompok nelayan atau keluarga nelayan dan yang diutamakan istri-istri nelayan.

## **B. Adanya mekanisme dalam pelaksanaan Program PEMP**

1. Apa saja kegiatan dari program PEMP?

Jawab : Pelatihan dan pembinaan.

2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan program PEMP?

Jawab : Dinas Perikanan menghubungi kelompok/keluarga nelayan untuk datang ketempat acara atau kegiatan dilaksanakan dan memberikan pelatihan.

3. Berapakah kali kegiatan dilakukuan dalam setahun?

Jawab : 1 sampai 2 kali

4. Sudah berapa lama Program PEMP dilaksanakan?

Jawab : Program ini telah dilaksanakan dari 2012 dan setiap tahunnya dilaksanakan.

## **C. Adanya kemampuan pelaksana Program PEMP**

1. Apakah pelaksana program PEMP merupakan orang yang berkompeten/professional?

Jawab : Iya berkompeten. Pemateri dalam kegiatan pelatihan merupakan sarjana dan ahli dibidangnya, dan ada juga pemateri merupakan orang yang sudah menjalankan usaha tersebut dan berhasil.

2. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program PEMP?

Jawab : Kurangnya kemauan dari masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang diberikan.

3. Apakah sarana sudah mendukung dalam pelaksanaan Program PEMP?

Jawab : Belum

4. Apakah peranan masyarakat sudah baik dalam pelaksanaan Program PEMP?

Jawab : Kurang baik.

**Daftar Wawancara**  
**(Staff Dinas Perikanan)**

**Nama** : H. ISHAK  
**Umur** : 57 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Jabatan** : SEKRETARIS DINAS PERIKANAN  
**Alamat** : Lingkungan 3 Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi

**A. Adanya tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)**

1. Apa tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)?

Jawab : Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan dengan cara memberdayakan istri-istri nelayan.

2. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya program PEMP?

Jawab : Kurangnya kemampuan nelayan dalam memaksimalkan hasil penangkapan ikan.

3. Apakah tujuan dari Program PEMP sudah tercapai?

Jawab : Belum sepenuhnya tercapai karena masyarakat penerima program ini kurang mengaplikasikan ilmu atau pelatihan yang diberikan.

4. Siapakah sasaran dari Program PEMP?

Jawab : Istri-istri nelayan dan nelayan tradisional.

**B. Adanya mekanisme dalam pelaksanaan Program PEMP**

1. Apa saja kegiatan dari program PEMP?

Jawab : Pelatihan dan pembinaan.

2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan program PEMP?

Jawab : Dinas Perikanan menghubungi kelompok/keluarga nelayan untuk datang ketempat acara atau kegiatan dilaksanakan dan memberikan pelatihan.

3. Berapakah kali kegiatan dilakukan dalam setahun?

Jawab : 1 sampai 2 kali

4. Sudah berapa lama Program PEMP dilaksanakan?

Jawab : Program ini telah dilaksanakan dari 2012 dan setiap tahunnya dilaksanakan.

### **C. Adanya kemampuan pelaksana Program PEMP**

1. Apakah pelaksana program PEMP merupakan orang yang berkompeten/professional?

Jawab : Iya berkompeten. Pemateri dalam kegiatan pelatihan merupakan sarjana dan ahli dibidangnya, dan ada juga pemateri merupakan orang yang sudah menjalankan usaha tersebut dan berhasil.

2. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program PEMP?

Jawab : Dana, sehingga program yang diberikan hanya sampai dibatas pelatihan.

3. Apakah sarana sudah mendukung dalam pelaksanaan Program PEMP?

Jawab : Belum

4. Apakah peranan masyarakat sudah baik dalam pelaksanaan Program PEMP?

Jawab : Dalam kegiatan pelatihan masyarakat antusias tetapi setelah kegiatan masyarakat kurang mengaktualisasikan ilmu yang diberikan.

**Daftar Wawancara**  
**(Staff Dinas Perikanan)**

**Nama** : MHD. ARBIANSYAH S  
**Umur** : 28 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Jabatan** : STAFF BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
**Alamat** : Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh

**A. Adanya tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)**

1. Apa tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)?

Jawab : Meningkatkan kesejahteraan nelayan.

2. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya program PEMP?

Jawab : Dikarenakan nelayan masih jauh dari kata sejahtera dan ketika musim dan cuaca yang tidak baik nelayan tidak memiliki penghasilan.

3. Apakah tujuan dari Program PEMP sudah tercapai?

Jawab : Belum sepenuhnya tercapai karena masyarakat penerima program ini kurang mengaplikasikan ilmu atau pelatihan yang diberikan.

4. Siapakah sasaran dari Program PEMP?

Jawab : Kelompok nelayan atau keluarga nelayan dan yang diutamakan istri-istri nelayan.

**B. Adanya mekanisme dalam pelaksanaan Program PEMP**

1. Apa saja kegiatan dari program PEMP?

Jawab : Pelatihan dan pembinaan.

2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan program PEMP?

Jawab : Dinas Perikanan menghubungi kelompok/keluarga nelayan untuk datang ketempat acara atau kegiatan dilaksanakan dan memberikan pelatihan.

3. Berapakah kali kegiatan dilakukan dalam setahun?

Jawab : 1 sampai 2 kali

4. Sudah berapa lama Program PEMP dilaksanakan?

Jawab : Program ini telah dilaksanakan dari 2012 dan setiap tahunnya dilaksanakan.

### **C. Adanya kemampuan pelaksana Program PEMP**

1. Apakah pelaksana program PEMP merupakan orang yang berkompeten/professional?

Jawab : Iya berkompeten. Pemateri dalam kegiatan pelatihan merupakan sarjana dan ahli dibidangnya, dan ada juga pemateri merupakan orang yang sudah menjalankan usaha tersebut dan berhasil.

2. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program PEMP?

Jawab : Kurangnya kemauan dari masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang diberikan.

3. Apakah sarana sudah mendukung dalam pelaksanaan Program PEMP?

Jawab : Belum

4. Apakah peranan masyarakat sudah baik dalam pelaksanaan Program PEMP?

Jawab : Kurang baik.

## **Daftar Wawancara**

**(Nelayan)**

**Nama : ZAHIDIN (Kelompok Sabar)**

**Umur : 60 Tahun**

**Pendidikan : SD**

**Alamat : Gang Setia Desa Suka Maju**

### **D. Adanya peningkatan kesejahteraan Nelayan**

1. Apakah program PEMP merupakan sesuatu yang anda butuhkan?

Jawab : Tidak juga

2. Apakah program PEMP dapat mengatasi masalah anda?

Jawab : Tidak juga

3. Apakah setelah mendapatkan program PEMP terjadi peningkatan kesejahteraan anda?

Jawab : Tidak, karena keluarga kami tidak menjalankan ilmu dari pelatihan yang diberikan

4. Apa saran anda untuk Program PEMP?

Jawab : Kami ingin agar jangan cuma dikasih pelatihan saja tetapi juga dikasih modal dalam memulai usaha dari ilmu yang didapat.

## **Daftar Wawancara**

**(Nelayan)**

**Nama : Hasan Basri (Kelompok Mawar)**

**Umur : 64 Tahun**

**Pendidikan : SD**

**Alamat : Gang Jogja Desa Suka Maju**

### **D. Adanya peningkatan kesejahteraan Nelayan**

1. Apakah program PEMP merupakan sesuatu yang anda butuhkan?

Jawab : Tidak juga.

2. Apakah program PEMP dapat mengatasi masalah anda?

Jawab : Tidak juga

3. Apakah setelah mendapatkan program PEMP terjadi peningkatan kesejahteraan anda?

Jawab : Tidak, karena keluarga kami tidak menjalankan ilmu dari pelatihan yang diberikan

4. Apa saran anda untuk Program PEMP?

Jawab : Kami ingin agar jangan cuma dikasih pelatihan saja tetapi juga dikasih modal dalam memulai usaha dari ilmu yang didapat.

## **Daftar Wawancara**

**(Nelayan)**

**Nama : AMERSYAH (Kelompok Makmur)**

**Umur : 50 Tahun**

**Pendidikan : SMP**

**Alamat : Gang Solo Desa Suka Maju**

### **D. Adanya peningkatan kesejahteraan Nelayan**

1. Apakah program PEMP merupakan sesuatu yang anda butuhkan?

Jawab : Tidak juga

2. Apakah program PEMP dapat mengatasi masalah anda?

Jawab : Tidak juga

3. Apakah setelah mendapatkan program PEMP terjadi peningkatan kesejahteraan anda?

Jawab : Tidak, karena keluarga kami tidak menjalankan ilmu dari pelatihan yang diberikan

4. Apa saran anda untuk Program PEMP?

Jawab : Kami ingin agar jangan cuma dikasih pelatihan saja tetapi juga dikasih modal dalam memulai usaha dari ilmu yang didapat.

## **Daftar Wawancara**

**(Nelayan)**

**Nama : ACIP (Kelompok Sejahtera)**

**Umur : 47 Tahun**

**Pendidikan : SMP**

**Alamat : Gang Baru Desa Suka Maju**

### **D. Adanya peningkatan kesejahteraan Nelayan**

1. Apakah program PEMP merupakan sesuatu yang anda butuhkan?

Jawab : Tidak juga

2. Apakah program PEMP dapat mengatasi masalah anda?

Jawab : Tidak juga

3. Apakah setelah mendapatkan program PEMP terjadi peningkatan kesejahteraan anda?

Jawab : Tidak, karena keluarga kami tidak menjalankan ilmu dari pelatihan yang diberikan

4. Apa saran anda untuk Program PEMP?

Jawab : Kami ingin agar jangan cuma dikasih pelatihan saja tetapi juga dikasih modal dalam memulai usaha dari ilmu yang didapat dan diberikan bantuan alat tangkap nelayan.

